



KEPUTUSAN MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR HK.01.07/MENKES/2067/2023

TENTANG

PESERTA PENEMPATAN DOKTER SPESIALIS
DALAM RANGKA PENDAYAGUNAAN DOKTER SPESIALIS
ANGKATAN KEDUA PULUH TUJUH TAHUN 2023

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : a. bahwa untuk pemenuhan kebutuhan dan peningkatan akses masyarakat terhadap pelayanan kesehatan spesialistik, perlu dilakukan upaya pendayagunaan dokter spesialis di seluruh Indonesia;

b. bahwa pendayagunaan dokter spesialis dilakukan melalui penempatan peserta dokter spesialis;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Menteri Kesehatan tentang Peserta Penempatan Dokter Spesialis Dalam Rangka Pendayagunaan Dokter Spesialis Angkatan Kedua Puluh Tujuh Tahun 2023;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik

- Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6887);
 3. Peraturan Presiden Nomor 31 Tahun 2019 tentang Pendayagunaan Dokter Spesialis (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 98);
 4. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2021 tentang Kementerian Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 83);
 5. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 36 Tahun 2019 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 31 Tahun 2019 tentang Pendayagunaan Dokter Spesialis (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1121);
 6. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 5 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 156);
 7. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 37 Tahun 2022 tentang Bantuan Biaya Pendidikan Kedokteran dan *Fellowship* (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1246);
 8. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor HK.01.07/Menkes/174/2020 tentang Penambahan Jenis Spesialisasi Dalam Rangka Pendayagunaan Dokter Spesialis;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI KESEHATAN TENTANG PESERTA PENEMPATAN DOKTER SPESIALIS DALAM RANGKA PENDAYAGUNAAN DOKTER SPESIALIS ANGKATAN KEDUA PULUH TUJUH TAHUN 2023.

- KESATU : Menetapkan peserta penempatan dokter spesialis dalam rangka pendayagunaan dokter spesialis angkatan kedua puluh tujuh tahun 2023 yang selanjutnya disebut Peserta sesuai dengan daftar nama dan lokasi penempatan Peserta sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Menteri ini.
- KEDUA : Peserta sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU terdiri atas dokter spesialis obstetri dan ginekologi, spesialis anak, spesialis penyakit dalam, spesialis bedah, spesialis anestesi dan terapi intensif, spesialis radiologi, spesialis patologi klinik, dan spesialis jantung dan pembuluh darah.
- KETIGA : Peserta sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU terdiri atas:
- a. penerima bantuan biaya pendidikan secara langsung; dan
 - b. penerima bantuan biaya pendidikan secara tidak langsung.
- KEEMPAT : Peserta sebagaimana dimaksud dalam Diktum KETIGA berstatus ASN dan nonASN.
- KELIMA : Jangka waktu penempatan Peserta penerima bantuan biaya pendidikan secara langsung sebagaimana dimaksud dalam Diktum KETIGA huruf a sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KEENAM : Jangka waktu penempatan Peserta penerima bantuan biaya pendidikan secara tidak langsung sebagaimana dimaksud dalam Diktum KETIGA huruf b:
- a. dengan status ASN sesuai dengan ketentuan instansi asal masing-masing; dan
 - b. dengan status nonASN selama 12 (dua belas) bulan.
- KETUJUH : Peserta sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU memiliki hak dan kewajiban sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.


KEDELAPAN : Keputusan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 27 September 2023

MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

BUDI G. SADIKIN

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Hukum
Sekretariat Jenderal Kementerian Kesehatan,

Indah Febrianti, S.H., M.H.
NIP 197802122003122003

LAMPIRAN
KEPUTUSAN MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR HK.01.07/MENKES/2067/2023
TENTANG
PESERTA PENEMPATAN DOKTER SPESIALIS
DALAM RANGKA PENDAYAGUNAAN DOKTER SPESIALIS
ANGKATAN KEDUA PULUH TUJUH TAHUN 2023

DAFTAR NAMA DAN LOKASI PENEMPATAN PESERTA PENEMPATAN DOKTER
SPESIALIS DALAM RANGKA PENDAYAGUNAAN DOKTER SPESIALIS
ANGKATAN KEDUA PULUH TUJUH TAHUN 2023

A. Peserta Penerima Bantuan Biaya Pendidikan Secara Langsung

No	Nama	Rumah Sakit	Kabupaten/ Kota	Provinsi	Lama Penugasan
1	dr. Syairodhi, Sp.B	Pemerintah Daerah Kabupaten Aceh Singkil	Aceh Singkil	Aceh	Disesuaikan dengan ketentuan peraturan perundang- undangan
2	dr. Rahmat Haris Pribadi, Sp.An	RSUD Mohammad Natsir	Kota Solok	Sumatera Barat	Disesuaikan dengan ketentuan peraturan perundang- undangan
3	dr. Siti Hardianti Harahap, Sp.OG	RSUD Talang Ubi	Penukal Abab Lematang Ilir	Sumatera Selatan	Disesuaikan dengan ketentuan peraturan perundang- undangan
4	dr. Kartika Ikrama Shafirlana, Sp.OG	Pemerintah Daerah Kabupaten Muara Enim	Muara Enim	Sumatera Selatan	Disesuaikan dengan ketentuan peraturan

No	Nama	Rumah Sakit	Kabupaten/ Kota	Provinsi	Lama Penugasan
					perundang- undangan
5	dr. Rennilia Nita, Sp.PK	RSUD Dr. M. Yunus Bengkulu	Kota Bengkulu	Bengkulu	Disesuaikan dengan ketentuan peraturan perundang- undangan
6	dr. Agatha Pradana, Sp.OG	Pemerintah Daerah Provinsi DKI Jakarta	Pemerintah Daerah Provinsi DKI Jakarta	DKI Jakarta	Disesuaikan dengan ketentuan peraturan perundang- undangan
7	dr. Adhitya Yudha Maulana, Sp.OG	RSUD dr. Soekardjo	Kota Tasikmalaya	Jawa Barat	Disesuaikan dengan ketentuan peraturan perundang- undangan
8	dr. Gun Gun Gunawan, Sp.B	RSUD Kabupaten Ciamis	Ciamis	Jawa Barat	Disesuaikan dengan ketentuan peraturan perundang- undangan
9	dr. Ratna Setyaningsih, Sp.An	RSUD Kayen Pati	Pati	Jawa Tengah	Disesuaikan dengan ketentuan peraturan perundang- undangan
10	dr. Tomi Juliandi, Sp.B	RSU Pemangkat	Sambas	Kalimantan Barat	Disesuaikan dengan ketentuan peraturan

No	Nama	Rumah Sakit	Kabupaten/ Kota	Provinsi	Lama Penugasan
					perundang- undangan
11	dr. Wirdasari, Sp.PD	RSUD Sultan Syarif Mohammad Alkadri	Kota Pontianak	Kalimantan Barat	Disesuaikan dengan ketentuan peraturan perundang- undangan
12	dr. Dwi Arry Wibowo, Sp. OG	RSUD Inche Abdoel Moeis	Kota Samarinda	Kalimantan Timur	Disesuaikan dengan ketentuan peraturan perundang- undangan
13	dr. Dian Dina Sholihah Saka, Sp. PD	RSU Kota Tarakan	Kota Tarakan	Kalimantan Utara	Disesuaikan dengan ketentuan peraturan perundang- undangan
14	dr. Eko Sandy Sinaga, Sp. B	RSUD Lapangan Sawang	Kepulauan Siau Tagulandang Biaro	Sulawesi Utara	Disesuaikan dengan ketentuan peraturan perundang- undangan
15	dr. Megawati Rif'atyyah Nozomi Guntur, Sp. PD	RSUD Kabupaten Buton Selatan	Buton Selatan	Sulawesi Tenggara	Disesuaikan dengan ketentuan peraturan perundang- undangan
16	dr. Famila, Sp. An	RSUD Kabupaten Pulau Morotai	Pulau Morotai	Maluku Utara	Disesuaikan dengan ketentuan peraturan

No	Nama	Rumah Sakit	Kabupaten/ Kota	Provinsi	Lama Penugasan
					perundang-undangan
17	dr. Eduward Yakub Pasangka, Sp. OG	RSUD Kabupaten Mappi	Mappi	Papua	Disesuaikan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
18	dr. Filandy Pai, Sp. B	RSU Wamena	Jayawijaya	Papua	Disesuaikan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
19	dr. Roy Christian Bangun, Sp. OG	Kementerian Pertahanan Republik Indonesia	Kementerian Pertahanan Republik Indonesia	Kementerian Pertahanan Republik Indonesia	Disesuaikan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan

B. Peserta Penerima Bantuan Biaya Pendidikan Secara Tidak Langsung yang Berstatus ASN

No	Nama	Rumah Sakit	Kabupaten/ Kota	Provinsi	Lama Penugasan
1	dr. Ari Chandra Ervina, Sp. OG	Pemerintah Daerah Kabupaten Aceh Timur	Aceh Timur	Aceh	Sesuai dengan ketentuan instansi asal
2	dr. Devi Silvia Agustina, Sp. OG	Pemerintah Daerah Kabupaten Lampung Barat	Lampung Barat	Lampung	Sesuai dengan ketentuan

No	Nama	Rumah Sakit	Kabupaten/ Kota	Provinsi	Lama Penugasan
					instansi asal
3	dr. Tati Muliani, Sp.PD	Pemerintah Daerah Kabupaten Bandung Barat	Bandung Barat	Jawa Barat	Sesuai dengan ketentuan instansi asal
4	dr. Pande Made Suwanpramana, Sp.OG	Pemerintah Daerah Kabupaten Gianyar	Gianyar	Bali	Sesuai dengan ketentuan instansi asal
5	dr. Indra Kusuma, Sp.An	Pemerintah Daerah Kabupaten Lombok Tengah	Lombok Tengah	Nusa Tenggara Barat	Sesuai dengan ketentuan instansi asal
6	dr. Michelle Rachel Toemandoek, Sp. OG	Pemerintah Daerah Provinsi Sulawesi Utara	Pemerintah Daerah Provinsi Sulawesi Utara	Sulawesi Utara	Sesuai dengan ketentuan instansi asal
7	dr. Andi Uci Febrianti, Sp. OG	RSUD Lamaddukkelleng Sengkang	Wajo	Sulawesi Selatan	Sesuai dengan ketentuan instansi asal
8	dr. Andi Rahmayanti, Sp. OG	Pemerintah Daerah Kabupaten Pinrang	Pinrang	Sulawesi Selatan	Sesuai dengan ketentuan instansi asal
9	dr. Yafet Yanri Sirupang, Sp. An	RSUD Kabupaten Mappi	Mappi	Papua	Sesuai dengan ketentuan instansi asal

No	Nama	Rumah Sakit	Kabupaten/ Kota	Provinsi	Lama Penugasan
10	dr. Hardianto Daud Musu, Sp. B	RSUD Karubaga	Tolikara	Papua	Sesuai dengan ketentuan instansi asal

C. Peserta Penerima Bantuan Biaya Pendidikan Secara Tidak Langsung yang Berstatus nonASN

No	Nama	Rumah Sakit	Kabupaten/ Kota	Provinsi	Lama Penugasan
1	dr. Citra Haflinda Prihatiningrum, SpAn TI	RSUD Basemah Kota Pagar Alam	Kota Pagar Alam	Sumatera Selatan	12 bulan
2	dr. Wardy Susanto Marpaung, M. KedOG, Sp. OG	RSUD Tais	Seluma	Bengkulu	12 bulan
3	dr. Karina Eda Clearesta, Sp. B	RSUD Kabupaten Belitung Timur	Belitung Timur	Kepulauan Bangka Belitung	12 bulan
4	dr. Kevin Agastya Duarsa, Sp. OG	RSUD Kelet Provinsi Jawa Tengah	Jepara	Jawa Tengah	12 bulan
5	dr. Muhammad Hatta, Sp. OG	RSUD Simo	Boyolali	Jawa Tengah	12 bulan
6	dr. Ifan Surya Adhitama, MMR, Sp. OG	RSUD Waras Wiris	Boyolali	Jawa Tengah	12 bulan
7	dr. Sukriyah Ambarwati Darise, Sp. An TI	RSUD Umar Mas'ud	Gresik	Jawa Timur	12 bulan
8	dr. Glenn Ega Budi Tanoyo, Sp. OG	RSUD Umar Mas'ud	Gresik	Jawa Timur	12 bulan
9	dr. Tri Dita Maharani, Sp. PD	RSUD Umar Mas'ud	Gresik	Jawa Timur	12 bulan

No	Nama	Rumah Sakit	Kabupaten/ Kota	Provinsi	Lama Penugasan
10	dr. Priscilla Yessy Handayani, Sp.Rad	RSU Tangguwisia	Buleleng	Bali	12 bulan
11	dr. Made Bayu Agastia Rakateja, Sp.PD	RSUD MGR Gabriel Manek	Belu	Nusa Tenggara Timur	12 bulan
12	dr. Hafis Novyan, Sp.OG	RSUD Alor	Alor	Nusa Tenggara Timur	12 bulan
13	dr. Rienna Diansari, Sp.JP, FIHA	RSUD Komodo	Manggarai Barat	Nusa Tenggara Timur	12 bulan
14	dr. Hendry Yoseph Nainggolan, Sp.JP	RSUP dr. Ben Mboi Kupang	Kupang	Nusa Tenggara Timur	12 bulan
15	dr. Ivan Banjuradja, Sp.PD	RSUD S. K. Lerik	Kota Kupang	Nusa Tenggara Timur	12 bulan
16	dr. Berniquez Moriano Sibi, Sp.OG	RSUD Bengkayang	Bengkayang	Kalimantan Barat	12 bulan
17	dr. Deady Nurdianto, Sp.An	RSUD Lamandau	Lamandau	Kalimantan Tengah	12 bulan
18	dr. Ardin Toding, Sp.OG	RSUD Kuala Kurun	Gunung Mas	Kalimantan Tengah	12 bulan
19	dr. Denny Miftahur Ramadhan, Sp.B	RSUD Pangeran Jaya Sumitra	Kotabaru	Kalimantan Selatan	12 bulan
20	dr. Ali Mufis, MH.Kes, Sp.An TI	RSUD Balangan	Balangan	Kalimantan Selatan	12 bulan
21	dr. Kusuma Wardani, Sp.OG	RS Gerbang Sehat Mahulu	Mahakam Ulu	Kalimantan Timur	12 bulan
22	dr. Ibnul Barakah, Sp.B	RSUD Tora Belo	Sigi	Sulawesi Tengah	12 bulan
23	dr. Bryan Dennis Bogar, Sp.B	RSUD Raja Tombolotutu	Parigi Moutong	Sulawesi Tengah	12 bulan

No	Nama	Rumah Sakit	Kabupaten/ Kota	Provinsi	Lama Penugasan
24	dr. Jessie Irvine Ijong, Sp.B	RSUD Buluye Napoae Moutong	Parigi Moutong	Sulawesi Tengah	12 bulan
25	dr. Marcella Putri Jeannette Merung, Sp.B	RSUD Trikora Salakan	Banggai Kepulauan	Sulawesi Tengah	12 bulan
26	dr. Richard Ezra Putra, Sp.B	RSUD Wakatobi	Wakatobi	Sulawesi Tenggara	12 bulan
27	dr. Mohamad Rifal, Sp.PD	RSUD Pasangkayu	Pasangkayu	Sulawesi Barat	12 bulan
28	dr. Zella Anggy Angela, Sp.OG	RSUD Namrole	Buru Selatan	Maluku	12 bulan

MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

BUDI G. SADIKIN

Salinan sesuai dengan aslinya

Kepala Biro Hukum
Sekretariat Jenderal Kementerian Kesehatan,


Indah Febrianti, S.H., M.H.
NIP 197802122003122003